

**PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**

**1. PETUGAS PERSIDANGAN**

Desk : 01  
 Provinsi : Provinsi Papua Barat Daya  
 Pimpinan Sidang 1 : Togu Pardede, ST, MIDS  
 Pimpinan Sidang 2 : Nursyaf Rullihandia S., ST, MM  
 Notulis Aplikasi : Wdia Anggi Palupi  
 Notulis Offline: Dinny Febriana Hapsari  
 Pembahas :

Pemerintah Daerah	Kementerian/Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
1. <i>Bappeda Provinsi Papua Barat Daya</i>	1. <i>Kementerian Kesehatan</i>	1. <i>Direktorat Agama, Pendidikan dan Kebudayaan</i>
2. <i>Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat Daya</i>	2. <i>Kementerian Perhubungan</i>	2. <i>Direktorat Kelautan dan Perikanan</i>
3. <i>Dinas Pertanian Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya</i>	3. <i>Kementerian Kelautan dan Perikanan</i>	3. <i>Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga</i>
4. <i>Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Daya</i>	4. <i>Kementerian Perdagangan</i>	4. <i>Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat</i>
5. <i>Dinas ESDM Provinsi Papua Barat Daya</i>	5. <i>Kemendikbudristek</i>	5. <i>Direktorat Ketenagakerjaan</i>
	6. <i>Kementerian ESDM</i>	6. <i>Direktorat Pangan dan Pertanian</i>
	7. <i>Kementerian Pertanian</i>	7. <i>Direktorat Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional</i>
	8. <i>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)</i>	8. <i>Direktorat Perumahan dan Permukiman</i>
	9. <i>Kementerian Komunikasi dan Informatika</i>	9. <i>Direktorat Sumber Daya Air</i>
	10. <i>Kementerian Pemuda dan Olahraga</i>	10. <i>Direktorat Transportasi</i>
	11. <i>Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi</i>	11. <i>Direktorat Perkim</i>
	12. <i>Kementerian Ketenagakerjaan</i>	12. <i>Direktorat Regional II</i>
	13. <i>BP3OKP</i>	



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

# NOTULENSI PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		13.
--	--	-----

### 2. KESEPAKATAN DAN CATATAN PERSIDANGAN

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
1	Pembangunan Pendidikan Vokasi Provinsi Papua Barat Daya	2	0	Paket	9801 - Kab. Sorong, 9803 - Kab. Raja Ampat	023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	<b>DITOLAK</b> , diarahkan melalui mekanisme SBSN		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		03 - Transformasi Tata Kelola		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4262 - Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan	PDI - Sertifikasi Profesi dan SDM		040 - Siswa SMK yang Tersertifikasi Terhadap Kompetensi yang Relevan dengan Kebutuhan Dunia Kerja			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	<p>Bapperida Provinsi Papua Barat Daya :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pembangunan Pendidikan vokasi ini merupakan tindak lanjut dari Raja Ampat sebagai Geopark dunia. Akan ada sekolah vokasi khusus pariwisata. Kami bekerjasama dengan UNCEN dimana tahun 2023 sudah selesai FS nya. Usulan ini untuk lulusan SMK untuk melanjutkan ke vokasi.</li><li>- Di raja ampat lahan sudah ada, FS sudah ada. UNIPA hampir sudah mau launching, namun tidak bisa karena kewenangan di Kemendikbud.</li><li>- Di Sorong selatan sudah ada vokasi, khusus untuk Sagu dan sudah berjalan. Di Sorsel sudah ada perusahaan sagu.</li><li>- Pendidikan vokasi sangat penting. Di kab Tambrwa akan dikembangkan sekolah pariwisata berbasis sekolah asrama. Wisata penyu. Selain itu pengembangan kawasan pesisir mulai dari distrik Migas.</li></ul> <p>BP3OKP:</p>		<p>Dit. Reg III :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Di Raja Ampat sudah ada SMK dan jurusan pariwisata. Rencananya akan dibuat diatas SMK. Pada saat akan dibangun, perlu dipastikan lulusan ini akan dapat diserap, karena lulusan SMK ini biasanya tidak jelas dan tidak dapat diserap, kelemahannya karena Bahasa inggris, akhirnya mereka memfasilitasi lab Bahasa. Jika saat ini ada niat untuk membentuk akademi pariwisata, diarahkan melalui SBSN. SBSN penyiapannya ada di Tahun kedua, berarti tahun depan baru penyiapan. Tahun 2026 baru pelaksanaan melalui mekanisme SBSN.</li></ul>	
--	---	--	--	--



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- di Sorsel memiliki lahan sagu terluas. Sudah mendapat ijin UPT kemendikbud.</li> <li>- kita bisa mengembangkan sesuai potensi daerah.</li> <li>- Vokasi ini sangat penting untuk Papua. Ada 2 sasaran dari sisi keterampilan kerja dan etos kerja.</li> </ul>						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
2	Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Papua Barat	1	0	Paket	9806 - Kota Sorong	024 - KEMENTERIAN KESEHATAN	<b>DITOLAK</b> dengan catatan. Perlu ada Roadmap tahapan untuk mencapai RS Vertikal. Kesiapannya saat ini belum lebih <i>advance</i> , sehingga saat ini dialihkan ke DAK.	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		01 - Kesehatan untuk Semua		
		Program	Kegiatan	KRO	RO			
		DG - Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	2090 - Pembinaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	QDB - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002 - Transformasi layanan rujukan dalam penguatan tata kelola RS dan digitalisasi layanan kesehatan rujukan (Rekam Medis Elektronik)			
		Catatan dan Tanggapan						
Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		<p>Bapperida Provinsi Papua Barat Daya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ini menjadi 12 roadmap yang disyaratkan. PBD belum ada RS tipe B dan RS rujukan. Kami Provinsi PBD sudah Menyusun masterplan dan FS. Kami berharap ini bisa menjadi RS vertikal. Karena di Sorong sudah ada RS tipe C, RS pratama.</li><li>- Harapannya rumah sakit ini menjadi RS provinsi.</li><li>- Surat kami sampai skrg belum di respon oleh Kemenkes.</li><li>- Ini di Kampung Baru (km 0).</li><li>- RS rujukan cancer di Sorong itu ada usulan tersendiri. Kalau ini khusus di Kampung Baru (RS baru)</li></ul> <p>BP3OKP:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Posisi PBD sangat strategis, kunjungan wisata sangat tinggi, kami akan tetap memperjuangkan karena wisatawan sangat berharap ada RS dan dapat terlayani. Selain itu provinsi sekitar. Dari Biro Perencanaan, ada 3 rencana RS vertikal, saat ini dibangun di Uncen Jayapura. Dari Akses transportasi sangat sulit kesana, sehingga dapat ke Papua Barat Daya nantinya.</li></ul>				
<b>No</b>	<b>Usulan</b>	<b>Volume</b>	<b>Satuan</b>	<b>Lokasi Kab/Kota</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>	



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
<b>3</b>	<b>Pembangunan Gedung Kantor OPD Provinsi Papua Barat Daya</b>	14	0	Gedung	9806 - Kota Sorong	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<b>DITOLAK PADA RAKORTEK</b>		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		03 - Transformasi Tata Kelola		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		09 - Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>			<b>RO</b>	
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		RBR - Dukungan Teknis			001 - Layanan Penyiapan dan Pengendalian Pelaksanaan	
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		-		-		-			
<b>No</b>	<b>Usulan</b>	<b>Volume</b>		<b>Satuan</b>	<b>Lokasi Kab/Kota</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>	<b>Hasil Kesepakatan</b>		
		<b>Usulan</b>	<b>Kesepakatan</b>						
<b>4</b>	<b>Rekonstruksi Ruas Jalan</b>	50	0	km	9804 - Kab. Tambrauw	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<b>DITOLAK PADA RAKORTEK</b>		



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Mega-Sausapor-Kwoor	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
	02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
	Program	Kegiatan	KRO		RO			
	GA - Program Infrastruktur Konektivitas	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	RBC - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		002 - Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)			
	Catatan dan Tanggapan							
	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
	-		-		-			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
5	Pengembangan Taxiway, Apron, Landasan Pacu (Runway), Runway End Safety Area (RESA), Precision	1	1	Paket	9806 - Kota Sorong	022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DIAKOMODIR PADA RAKORTEK	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	<b>Aproach Lighting (PALs), Talud Dinding Penahan Air Laut &amp; Pagar Pengaman Sisi Udara, Terminal Kargo, Bangunan Administrasi, Bangunan PKP-PK, Ground Service Equipment (GSE), Bangunan Operasional Bandara DEO Sorong</b>	GA - Program Infrastruktur Konektivitas	4645 - Infrastruktur Konektivitas Transportasi Udara	RBE - Prasarana Bidang Konektivitas Udara	005 - Bandar Udara		
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>			<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>
		-		-			-
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
6	Pembangunan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai Kota Sorong, PPI Katapop Kabupaten	3	0	Paket	9801 - Kab. Sorong, 9802 - Kab. Sorong Selatan, 9803 - Kab. Raja Ampat, 9804 - Kab. Tambrauw, 9806 - Kota Sorong	032 - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	<b>DITOLAK, dialihkan ke DAK.</b>
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>	



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

<b>Sorong, Klademak.</b>	<b>PPI</b>	02 - Transformasi Ekonomi	02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan	16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>
		HB - Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan	2338 - Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	RAL - Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	001 - Sarana penunjang pemungutan PNBP Perikanan Tangkap yang disediakan
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>			
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	
		<p>Bapperida Provinsi Papua Barat Daya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada eksisting Pelabuhan, dapat pelimpahan dari Papbar, ada 2 lokasi, di Katapo dan Klademak.</li> <li>- Saat ini kumuh sehingga tidak terlihat ini pendaratan ikan. Lebih banyak kapal ke raja ampat yang masuk dalam Pelabuhan perikanan.</li> <li>- Sudah kami usulkan dalam DAK. Kami berharap di tahun depan bisa dibantu Kementerian Kelautan.</li> <li>- Di Katapo yang mati suri pelabuhannya.</li> </ul> <p>Dinas pertanian pangan, kelautan perikanan provinsi PBD:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di Katapop ini revitalisasinya Gedung dan pabrik es, dimakan usia sudah rusak sehingga perlu</li> </ul>	<p>Kementerian KKP</p> <p>Kami sepakat dengan Dit KP, terkait dengan kewenangan provinsi sehingga masuk dalam DAK. Terkait dengan beberapa Pelabuhan juga sudah di DAK.</p>	<p>Dit Kelautan Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan ini merupakan kewenangan daerah, Klademak maupun Katopo merupakan UPTD daerah. Kami mengusulkan ditolak, namun masuk ke dalam DAK, namun saat ini masih menunggu proses DAK.</li> <li>- Prioritas pertama di Katapop dan kedua Klademak. Dan ketiga di Marina Kota Sorong</li> <li>- Di RIPPN ada Katapop, Klademak dan Kota Sorong (Pelabuhan Perikanan Kota Sorong).</li> <li>- Sudah masuk dalam rincian menu di DAK (untuk pabrik es, jalan)</li> <li>- Reklamasi tidak bisa masuk.</li> </ul>	



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		<p>direhabilitas untuk mesinnya. Di beberapa titik saja untuk gedungnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di PPI Klademak jembatan puri, yaitu pembangunan pabrik es, pengaspalan jalan di sekitar Pelabuhan perikanan. Untuk optimalisasi Pelabuhan perikanan dan meningkatkan pendapatan.</li> <li>- di Pelabuhan Katapo ada pembangunan dermaga dan peningkatan perikanan PIT sebesar 500 juta</li> </ul>						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
7	Revitalisasi Pasar Sentral Remu Kota Sorong	1	0	unit	9806 - Kota Sorong	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DITOLAK, karena perlu rekomendasi dari Kemendag untuk KemenPUPR dapat membangun	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		08 - Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi		
		Program	Kegiatan		KRO			RO
		EF - Program Perdagangan Dalam Negeri	5090 - Pengembangan Sarana Perdagangan dan Kapasitas Logistik		RBL - Prasarana Bidang Industri dan Perdagangan			001 - Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Catatan dan Tanggapan		
Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas
<p>Bapperinda Provinsi Papua Barat Daya:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Usulan dari Pemerintah kota Sorong. Pasar ini merupakan pasar tertua. Lebih focus untuk redesain pasar sentral ini karena dekat dengan Pusat Kota, Bandara, sehingga bisa menjadi pusat Oleh-oleh.</li><li>- Kami sudah study banding di beberapa kota untuk pasar modern</li><li>- RC sudah siap, sertifiakt sudah ada, termasuk RAB dan gambar DED dan MP. Pada saat itu walikota masuknya ke Kemendag. Kami akan segera memasukkan ke Kementerian PUPR.</li><li>- Pernah dibahas bersama-sama dengan Balai CK. Pak Jokowi berjanji untuk membangun pasar ini.</li><li>- Sudah ada survey dari Kemendag, setelah ada kajian dari Kemendag, dioper ke Kementerian PUPR.</li><li>- Anggaran sebenarnya sudah masuk dalam APBD di Pelabuhan Arborek, namun Ketika bahas</li></ul>	<p>Kementerian PUPR BPIW:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Revitalisasi pasar sentral sudah dbahas di Rakortek, ketersediaan RCnya seperti apa.</li></ul>	<p>Pimsid 2:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Di PUPR belum dibahas dalam Konreg, pembangunannya harus di PU, namun belum dibahas dalam Konreg.</li><li>- Kewenangan pasar ini harus dipastikan dari pusat atau daerah.</li><li>- Dalam forum ini berarti belum diterima apabila dari kemendag belum menyetujui.</li></ul> <p>Regional III Bappenas</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menurut catatan kami perlu didiskusikan dengan KemenPUPR dan berdasarkan rekomendasi Kemendag, karena Kamendag belum menyetujui melakukan pembangunan ini.</li></ul>



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		<p>rencana aksi, karena tidak masuk dalam RIPN, sehingga dana itu hangus.</p> <p>BP3OKP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ini menjadi sumber pendapatan asli di Papua Barat Daya,</li><li>- Pasar ini harus didukung agar bisa lebih mandiri. Kemendag sudah berkunjung dan ini menjadi janji Kemendag.</li><li>- Bisa dari maybrat, tmbraw bisa ke pasar ini.</li><li>- Sejumlah Dana Otsus dari kementerian terkait, terpaksa dana nya hangus akibat kewenangan yang belum jelas. Papua perlu diskresi untuk Papua bisa maju.</li></ul>					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
8	Pembangunan Pusat Visium dan Museum Budaya Papua	2	0	Gedung	9802 - Kab. Sorong Selatan	023 - KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI	DITOLAK
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan	02 - Pendidikan Berkualitas yang Merata			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>		
		DH - Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	6962 - Pengelolaan Museum, Galeri, dan Cagar Budaya	RBN - Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan	002 - Revitalisasi Museum dan Galeri		
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
		<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		Bapperinda - Usulan ini inisiasi dari Gubernur, terkait dengan otonomi khusus jilid 2. Tahun lalu sudah kerjasama dengan UGM untuk Menyusun Visium Papua 2024.	Kemendikbud - Usulan ini belum dapat diakomodir karena keterbatasan fiscal - Pemda berkoordinasi dengan Balai UPT. - Kemendikbud diarahkan ke KemenPUPR untuk membangun fisik ini. - Balai UPT kami kemungkinan dapat menampung di tahun berikutnya. - Di Kami hanya pembangunan Gedung pusat budaya.				
<b>No</b>	<b>Usulan</b>	<b>Volume</b>		<b>Satuan</b>	<b>Lokasi Kab/Kota</b>	<b>Kementerian/Lembaga</b>	<b>Hasil Kesepakatan</b>
		<b>Usulan</b>	<b>Kesepakatan</b>				
<b>9</b>	<b>Pembangunan Ruas Jalan</b>	27,5	0	Km	9805 - Kab. Maybrat	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<b>DITOLAK PADA RAKORTEK</b>



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	<b>Susumuk Bintuni</b>	<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>		<b>RO</b>		
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		RBC - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		002 - Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)		
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>			<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
		-		-			-		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
10	Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro di 5 Kabupaten se-Papua Barat Daya	5	0	Unit	9801 - Kab. Sorong, 9802 - Kab. Sorong Selatan, 9803 - Kab. Raja Ampat, 9804 - Kab. Tambrauw, 9805 - Kab. Maybrat	020 - KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<b>DITOLAK</b> karena keterbatasan fiskal dari Kementerian ESDM		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	02 - Transformasi Ekonomi	02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan	16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	
	<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>	<b>RO</b>
	JA - Program Energi dan Ketenagalistrikan	6353 - Perencanaan, Pembangunan dan Pengawasan Infrastruktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi	QEG - Bantuan Peralatan / Sarana	004 - PLTMH
	<b>Catatan dan Tanggapan</b>			
	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	
	<p>Bapperida</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika dilihat data PLN, kami hampir 100% bukan berarti itu sudah merata. Untuk daerah tertinggal terutama tambraw, punya sungai besar, saat rakortek kemarin kita mengusulkan Waduk karna sudah ada FS nya.</li> <li>- Dari Dinas SDM sudah ada kajian dan DED sudah siap dari tahun kemarin, dan ada rencana induk pengembangan energi bersama UGM.</li> </ul> <p>Dinas ESDM Ada 5 lokasi yang diusulkan.</p>	<p>Kementerian ESDM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan PLTA ini, dengan keterbatasan anggaran kami, rencana Renja kami di TA 2025 fokus pada PLTA multiyear kontrak yang sudah dilakukan dari tahun 2024. Apabila di tahun ini, mungkin akan dipertimbangkan di tahun 2026. Mohon bantuannya untuk memenuhi RC pembangunan PLTA, sesuai Permen ESDM no 12 tahun 2018.</li> </ul>	<p>Regional III</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saat Rakortek ditolak karena tidak masuk dalam RUPTL</li> <li>- Pembangunan PLTMH ini tidak gampang, cenderung tidak bisa maintainance.</li> </ul>	



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		Kami sarankan rencana pembangunan rumah kami akan masukkan jaringan listrik							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
11	Rekonstruksi Ruas Jalan SP2 Moswaren-Kais-Kokoda	112	0	km	Kab. Sorong Selatan	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<b>DITOLAK PADA RAKORTEK</b>		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	RBC - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)		002 - Pembangunan Jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP)			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
-	-		-						



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
12	Pengembangan Perkebunan Kelapa Dalam, Kakao dan Kopi	1	1	paket	9804 - Kab. Tambrauw	018 - KEMENTERIAN PERTANIAN	<b>DIAKOMODIR UNTUK KELAPA DALAM, Untuk kakao dan Kopi sudah ada RO nya, namun 2025 masih belum diakomodir.</b>		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		16 - Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>			<b>RO</b>	
		EC - Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	1777 - Pengembangan Kawasan Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma		RAI - Sarana Pengembangan Kawasan			001 - Kawasan Kelapa	
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		Dinas Pertanian - Usulan ini karena khas sorong selatan, raja ampat karena kualitasnya tinggi minyak kelapanya, Kakao dan Kopinya. Sehingga ini menjadi sentra kopi dan kakao.		Kementerian Pertanian - Terkait usulan ini, di RO kami merupakan RO yang beranak. RO Kwasan kelapa, Kawasan Kopi, Berdasarkan hasil Kortek Pertanian, yang disepakati terkait kawasan Kelapa berupa perluasan tanaman kelapa dalam. - Volume menyesuaikan dengan fiskal negara dan belum disepakati.		Tim Peta: Untuk Taggingnya, penggunaan Geometrik harusnya menggunakan area, di Peta masih menggunakan garis. Perlu diperbaiki.			



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

				- Untuk kakao dan Kopi sudah ada RO nya, namun 2025 masih belum diakomodir.					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
13	Pembangunan SPAM Provinsi Papua Barat Daya	3	1	SPAM	9801 - Kab. Sorong	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DIAKOMODIR dengan catatan koordinasi terkait asset yang dulu sudah terbangun.		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan		KRO			RO	
		FC - Program Ketahanan Sumber Daya Air	5040 - Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku		RBS - Prasarana Jaringan Sumber Daya Air			007 - Prasarana irigasi air tanah atau irigasi lainnya yang dibangun	
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			
		Dinas PUPR - SPAM regional ini sudah dilakukan MOU kementerian PUPR (CK) dan PU Provinsi, kab/kota untuk pengelolaan. Tinggal menunggu		Dit Air Minum KemenPUPR - Sudah direncanakan, lahan yang sudah terpakai kemarin perlu dikoordinasi kembali. - Penganggaran di tahun 2025. - Kapasitas IPA 2x 50 liter perdetik.		-			



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		<p>pembangunan Pipam reservoir dan pengelolaan dari Cipta Karya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dari SDA dari bendungan sampai air baku nya</li><li>- Dokumennya sudah disiapkan, sudah ada MOU dengan Provinsi Induk,</li><li>- Apakah nanti menggunakan pompa listrik atau solar cell. Karena terkait pembiayaannya.</li></ul> <p>Bapperinda</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sudah ada SPAM Regional di Sungai Wasamso. Sudah ada MOU dengan Papua Barat. Kendalanya di Lahan, untuk membangun Pipa. Dahulu ada kendala karena dipakai pariwisata namun sudah teratasi.</li><li>- Lahan saat ini tersedia 1 Ha,</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sebetulnya kewenangan SDA, Pompanya menggunakan listrik.</li><li>- Sudah ada 3 unit pompa listrik,</li></ul> <p>BPIW: SPAM Regional sudah masuk dalam FKW.</p>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
14	Pembangunan Menara Telekomunikasi (BTS)	20	0	Unit	9801 - Kab. Sorong, 9802 - Kab. Sorong Selatan, 9803 - Kab. Raja Ampat, 9804 - Kab.	059 - KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	<b>DITOLAK,</b> dengan catatan perlu koordinasi dengan Bakti terkait



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

				Tambrau,9805 - Kab. Maybrat,9806 - Kota Sorong		perencanaan yang sudah ada.
<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		06 - Tranformasi Digital		
<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>		
GF - Program Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	4961 - Penyediaan dan Pengelolaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi	RBT - Prasarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		002 - Akses Internet Papua dan Papua Barat		
<b>Catatan dan Tanggapan</b>						
<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
Bapperinda: - BTS ini belum merata yang sudah dilaksanakan Bakti Kominfo. Bandwitchnya masih kecil. - Usulan ini untuk daerah yang belum memiliki BTS. - Masih ada titik yang belum tercover. - Di Geotagging titik ini belum terjangkau, kemarin sempat dibantu oleh Telkomsel.		Kementerian Kominfo - Untuk pembangunan baru di 2025 belum bisa diakomodir. RO nya tidak ada untuk pembangunan BTS baru, yang ada hanyalah operasional BTS yang sudah ada. - Dari pemda apabila koordinasi dengan Bakti itu perencanaan yang sudah berjalan dan belum terlaksana dari perencanaan kemarin.		Dit KTI - Ada 6 lokasi yang sudah dilakukan pembangunan oleh Kominfo di Lopinto, Aniti, Kalwa, Musmanggara, Waisit, dan Inang buari. - Renja Kominfo 2024-2025 tidak ada pembangunan BTS baru karena kendala finansial. - Namun dari daerah tetap bisa mengusulkan lewat sistem Pasti.bakti.kominfo.id, dan kemungkinan bisa dilakukan oleh		



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

					Bakti apabila sudah sesuai dengan persyaratan.				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
15	Pembangunan Dermaga Fafanlap, Dermaga Konda dan Derma Konda Provinsi Papua Barat Daya	3	0	Dermaga	9802 - Kab. Sorong Selatan, 9803 - Kab. Raja Ampat	022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	<b>DITOLAK</b> Dialihkan ke DAK		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO	RO				
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	4660 - Infrastruktur Konektivitas Transportasi Laut	RBD - Prasarana Bidang Konektivitas Laut	080 - Replacement Fasilitas Pelabuhan Sarmi				
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
		Bapperida: - Masyarakat lebih banyak tinggal di pesisir dan sungai. Ketika kunjungan kerja di Misol, dikeluhkan warga tidak ada Pelabuhan, saat ini melabuh di Pelabuhan perusahaan.						Pimsid: - Tetap mengacu pada aturan, yang mengacu kewenangan. - Bisa dinaikan dahulu status kewenangannya	



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	<p>Sehingga untuk meningkatkan taraf hidup dan distribusi logistic membutuhkan Pelabuhan. DAK itu acuannya RIPN, namun secara riil amsyarakat membutuhkan Pelabuhan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Fafanlap Di Misol, Kokonda di Sorong Selatan.</li><li>- Pernah diusulkan DTI ke kemenhub, namun ditolak karena alasannya RIPN. Sedangkan di daerah sangat terbatas di akses ini. Ditolak Ketika usulan Arborek, statusnya ini sama dengan Pelabuhan ini.</li><li>- Masalahnya saat ini, Pelabuhan ini tidak masuk dalam RIPN.</li></ul> <p>Dinas Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terkait dengan diskresi, dilihat dari RIPN, dermaga ini hirarkinya Kabupaten dan Kota, permasalahannya sama seperti di Arborek. Kewenangannya hanya di Rajaampat. Kondisi saat ini ada 5 kab di daerah pesisir, mereka termasuk daerah 3T. Sehingga mohon dibuka ruang ada kebijakan anggaran pusat dan daerah serta Otsus DTI.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pembahasan sampai saat ini belum berkembang terkait DOB dan masih berada di Kementerian Keuangan. Namun saat ini belum selesai,</li><li>- DTI harus merupakan kewenangan daerah, apabila assetnya sudah jelas di Provinsi, bisa diusulkan melalui DTI.</li></ul> <p>Dit Transport</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pelabuhanya masih Pelabuhan Lokal termasuk 3 pelabuhan yang diusulkan. Kalau boleh dirapikan dahulu usulannya agar lebih jelas 3 usulan ini sesuai RIPN (dermaga Fafanlap, Konda dan Kokoda).</li><li>- RO nya masih Typo.</li><li>- Perikanan perlu dipastikan dahulu kewenangan masih didaerah dan asset di daerah,</li><li>- Terkait DTI, kedepannya kami akan mengawal K/L tentang penilaian DTI, ada miss persepsi, kami akan koordinasikan kembali bahwa DTI adalah kewenangan yang ditangani daerah.</li><li>- Diusulkan melalui DAK. Karena asetnya masih daerah.</li></ul> <p>Regional III</p>	
--	---	--	---	--



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kami mohon pertimbangan, Dana Otsus atau DTI dari kemenhub tidak akan membuka ruang.</li> <li>- Di RIPN, semua dermaga yang ada pada saat itu terkait dengan perusahaan khusus, kami provinsi tidak punya kewenangan untuk Pelabuhan tersebut. Sehingga perlu diberi ruang untuk pembangunan dermaga terutama PBD sebagai DOB.</li> <li>- Dinas Perhubungan tidak mendapat asset dermaga. Pelimpahan asset ini sedang berproses, untuk menyerahkan asset tersebut.</li> </ul> <p>BP3OKP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah bahas dengan Wapres, hasilnya ada persyaratan teknis saat ini yang perlu dibahas di Kementerian Keuangan.</li> <li>- Alasan terkait kewenangan jangan sampai membuat masyarakat kecewa.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lokasi Misol jauh, sehingga memang diperlukan Pelabuhan.</li> <li>- Mekanisme bermacam-macam kalau kewenangan di Daerah. Berhubung Pusat-Daerah bisa menggunakan DAK, DTI dan Otsus. Otsus bisa menggunakan 1%.</li> <li>- Pelabuhan Misol ini perlu dipastikan dahulu apakah urusan provinsi atau kabupaten.</li> <li>- Kami berusaha membantu, perlu dipastikan yang mengusulkan DAK ini dari kabupaten atau provinsi.</li> </ul>			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

16	Rekonstruksi Ruas Jalan Waisai - Waiwo - Saporkren	10	0	km	9803 - Kab. Raja Ampat	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	<b>DITOLAK.</b> Disarankan melalui DAK, PHJD, atau pembiayaan lainnya yang sah.	
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>		
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>		<b>KRO</b>			<b>RO</b>
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	2409 - Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional		RBC - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)			023 - Dukungan Penanganan Jalan Daerah
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>						
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
		<p>Bapperida</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kami diarahkan ke Inpres Jalan, namun kembali ke Lokpri di Saporkren adalah desa adat dan bisa melihat cendrawasih, sehingga perlu jalan untuk diperpanjang ke Saporkren</li> <li>- Jalan nasional dari Waisasi sampai bandara, dari bandara sampai Sarpoken daerah.</li> </ul> <p>BP3OKP</p>		<p>BPIW Kementerian PUPR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Untuk ruas jalan ini bukan ruas jalan nasional, sudah masuk dalam Inpres Jalan Daerah, namun kami sedang menunggu kepastian besaran anggaran, volume dan tahun untuk pembangunan jalan ini.</li> </ul> <p>Dit Bina Marga KemenPUPR:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait ruas ini, jalan non nasional, secara kewenangan bukan pusat. Pembahasannya sesuai dengan kewenangan, jika</li> </ul>		<p>Regional III</p> <p>IJD harus dipastikan apakah sudah diusulkan</p> <p>Dit Transport:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kami mengusulkan lewat DAK.</li> <li>- Inpres Jalan Daerah di tahun berapa, karena apabila di tahun 2024, usulan dari PBD berbeda dengan usulan ini.</li> <li>- Jalan daerah ini, informasi terakhir perlu review DED dahulu.</li> <li>- Untuk jalan nasional ada penanganan rutin.</li> </ul>		



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		- Permasalahan SDM, peralatan anggaran masih terbatas di dinas PBD. Kami masih proses transisi sebagai DOB baru.	<p>diluar itu kami mengusulkan pendanaan lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kami belum bisa menangani ruas jalan tersebut karena butuh diskresi.</li> <li>- Inpres Jalan Daerah sudah pembahasan dan sudah keluar suratnya dan ruas jalan ini tidak masuk. Jika tidak bisa ditangani APBN, bisa dengan DAK, PHJD, atau pembiayaan yang lain yang sah.</li> </ul>					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan	
		Usulan	Kesepakatan					
17	Pengembangan Kawasan Pantai Waisai Torang Cinta (WTC)	1	1 Paket (8,8 Ha)	paket	9803 - Kab. Raja Ampat	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DIAKOMODIR seluas 8,8 Ha	
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
		02 - Transformasi Ekonomi		01 - Pendapatan Per Kapita Setara Negara Maju		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
		Program	Kegiatan	KRO		RO		
		IA - Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	4971 - Penyelenggaraan Permukiman dan Bangunan Gedung	RBN - Prasarana Bidang Pariwisata dan Kebudayaan		002 - Penataan Bangunan Kawasan Destinasi Wisata		
		Catatan dan Tanggapan						



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
		<p>Bapperinda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saat rakortek, mau dikonfirmasi dahulu ke Balai dan Kementerian PUPR. Padahal dari tahun 2023 sudah diusulkan. Saat itu Balai Papua Barat sudah menyiapkan. DED sudah ada.</li> <li>- Hampir semua event dilaksanakan ditempat ini. Ini menjadi center point untuk event di Raja Ampat.</li> <li>- Usulan ini sudah berulang dan harus masuk di 2025.</li> </ul>	<p>BPIW Rencana ini sudah masuk dalam RUP Konreg, sudah masuk dalam tahun anggaran 2025 dengan anggaran 110,5 M.</p>				
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
18	Pembangunan Gedung Olahraga Pancasila Sorong	1	0	Gedung	9806 - Kota Sorong	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DITOLAK. Perlu disiapkan dahulu RCnya.
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		01 - Kesehatan untuk Semua	
		Program	Kegiatan	KRO	RO		



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	DA - Program Keolahragaan	3823 - Pengelolaan Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi	QDC - Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	005 - Bibit Olahragawan yang difasilitasi dalam Pemanduan Bakat Cabang Olahraga Olimpik	
<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
	<b>Pemerintah Daerah</b>	<b>Kementerian Lembaga</b>	<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>		
	<p>Bapperida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sudah ada milik Kabupaten Sorong</li> <li>- Saat ini sudah rusak berat, dan ini menjadi salah satu sarana untuk penyaluran bakat, karena banyak kegiatan olahraga.</li> <li>- 4 tahun yg lalu pernah dibuka akses untuk DAK terkait revitalisasi gedung, namun saat ini sudah tidak dibuka. Ketika itu RC belum tersedia.</li> <li>- Usulan Pasar dan Gor ini juga sudah dikomunikasikan dengan Balai, namun rekomendasi kementerian teknis belum ada ke Kementerian PUPR. RC padahal sudah siap. Saat ini kami butuh keseriusan dari Pemerintah Pusat.</li> </ul> <p>Dinas PU Provinsi</p>	<p>BPIW :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika untuk Gor sudah dibahas dalam Rakortek diusulkan kementerian Olahraga, namun GOR ini tidak masuk dalam usulan Provinsi sehingga tidak dibahas Konreg. Saat ini sedang menunggu konfirmasi dari Balai.</li> <li>- Dalam Konreg PUPR yang lalu, usulan ini tidak masuk dalam RUP.</li> <li>- Jika tidak masuk dalam RUP, tidak dapat masuk dalam rencana 2025.</li> <li>- Tergantung dari diskresi dan menunggu pemerintahan yang baru. Sementara kesiapan RC nya perlu disiapkan terlebih dahulu.</li> </ul>	<p>Pimsid 2: Dari Bappeda sudah memasukkan, namun kementerian teknis yang belum menyampaikan ke PUPR.</p> <p>Pimsid 1: Dilihat dari program ini merupakan quickwins yang bagus untuk Sorong sebagai Provinsi Baru.</p> <p>Dit KPAPO:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di Rakortek sudah diusulkan, namun dinas PU seharusnya mengikuti Konreg KemenPUPR.</li> <li>- Jika dilihat dari usulan ini, sejalan dengan kebijakan rencana awal RPJMN 2025-2029, diusulkan langsung ke Kementerian PU bukan dari Kemenpora.</li> <li>- 2019-2020 sempat ada DAK GOR, namun waktu itu RC belum siap sehingga belum bisa dibahas lebih lanjut.</li> <li>- Kemudian tahun 2021 dialihkan untuk penanganan Covid.</li> </ul>		



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Masalah kesiapan lahan sudah siap, dari PU Provinsi sudah siap perencanaannya.</li></ul> <p>Dinas Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Anggota U23 ada dari Sorong.</li><li>- Pengalaman di Kab Maybrat, Menteri PU janji untuk pembangunan stadion di Maybrat, kami berkomunikasi langsung dengan sekretaris Pak Menteri. Dokumen RC sudah siap. Ketika sudah lengkap, ternyata harus koordinasi lagi dengan kemnterian teknis lain.</li></ul> <p>BP3OKP</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Permasalahan sosial banyak di Sorong Raya, ada begal, pembunuhan. Terakhir ada pesta jalanan tiap malam minggu. Sehingga generasi ini perlu diselamatkan dengan fasilitas penyaluran bakat.</li><li>- Dari mekanisme rakortek atau konreg ini apakah usulan yang akan digunakan selanjutnya dari bappenas atau kementerian teknis.</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>- Untuk 2025, Tidak terdapat menu baru untuk Olahraga, sehingga kami belum bisa mengalokasikan.</li><li>- Alternatif selanjutnya dengan mekanisme pengusulan dari kementerian PUPR.</li><li>- RC belum memperhatikan desain pemanfaatan dan pemeliharaan karena penting.</li><li>- Perlu mempertimbangkan keterlibatan pihak ketiga untuk pemeliharaan dan pengelolaan. Kami mendorong ke KPBU.</li></ul>	
--	---	--	---	--



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
19	Pengaman Pantai di Pulau Fani Kabupaten Raja Ampat	200	200	meter	9803 - Kab. Raja Ampat		<b>DIREKOMENDASIKAN</b> pada Rakortek		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		05 - Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat		17 - Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		FC - Program Ketahanan Sumber Daya Air	5037 - Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai	RBS - Prasarana Jaringan Sumber Daya Air		003 - Prasarana pengaman pantai yang dibangun			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
		-		-		-			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
20	Pembangunan Bendungan	1	0	bendungan	9804 - Kab. Tambrau		<b>DITOLAK PADA RAKORTEK</b>		



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

Sungai Kwoor Kabupaten Tambrau	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		
	02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi		
	Program	Kegiatan	KRO		RO		
	FC - Program Ketahanan Sumber Daya Air	5039 - Pengembangan Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	RBG - Prasarana Bidang SDA dan Irigasi		001 - Bendungan yang direhabilitasi/ditingkatkan kapasitasnya		
	Catatan dan Tanggapan						
	Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas		
	-		-		-		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
21	Pembangunan Jalan Kawasan Transmigrasi	10	0	km	Kab. Sorong	067 - KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	<b>DITOLAK</b>
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	

## NOTULENSI PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		Program	Kegiatan	KRO	RO
		CT - Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	6471 - Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	RBC - Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan)	002 - Jalan Non-Status yang Dibangun di Kawasan Transmigrasi
<b>Catatan dan Tanggapan</b>					
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas	
		<p><b>Bapperinda</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di distrik Klamono (Kab Sorong).</li> <li>- Menjadi Perhatian kita semua karena masyarakat disana mengeluhkan koordinir hasil bumi nya masih terkendala karena jalan. Cukup besar biaya operasionalnya. Ini satu-satunya transmigrasi lokal dan terdiri dari OAP.</li> </ul> <p><b>Disnakertrans PBD</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Profil kawasan sudah kami serahkan di biro perencanaan kemendes.</li> <li>- Selain berisian dengan kawasan pariwisata, kawasan ini berisian dengan irisan KEK Sorong. Untuk dokumen teknisnya, tanggal 5 kami diundang dan akan mendorong dokumen teknisnya ke rakor transmigrasi tersebut.</li> </ul>	<p><b>Kementerian Desa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usulan ini di rakortek belum dibahas.</li> <li>- Terkait jalan belum ada usulan yang masuk.</li> <li>- Tanggal 5-7 mei ada rakornas transmigrasi bisa dibahas dalam forum tersebut.</li> <li>- Alternatif lain untuk jalan transmigrasi ini dimasukkan dalam DAK.</li> </ul> <p><b>Dit PPKT Trans</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada saat pembahasan rakor akan kami bahas kembali untuk kesiapannya.</li> <li>- Di PPKT Trans belum ada alokasi pagu indikatif, sehingga belum bisa menyampaikan apakah diterima atau ditolak.</li> </ul>	<p><b>Dit Regional II</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di PBD ada kawasan transmigrasi klamono segun, menjadi salah satu transmigrasi prioritas antara bappenas dan kemendes namun masih dalam proses kesepakatan penulisan di RPJMN.</li> <li>- Posisinya dekat dengan DPP Raja Ampat, untuk detailnya perlu ada penajaman lagi.</li> <li>- Usulan 21 dan 22 ini di lokasi yang sama. Usulannya 21 sudah sangat spesifik sementara di tolak dahulu. Untuk usulan 22 ini mungkin bisa diterima pada saat rakor transmigrasi.</li> </ul>	



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		- DED dan dokumen teknis lainnya sudah kami siapkan. Dokumen pelepasan adat sudah clean clear dan sudah pendaftaran di BPN -							
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan		
		Usulan	Kesepakatan						
22	Pembangunan Kawasan Transmigrasi Lokal	2	2	SP	Kab. Sorong	067 - KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI	DIAKOMODIR dengan catatan perlu dipastikan dalam Pagu Indikatif Kemendes		
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		08 - Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
		Program	Kegiatan	KRO		RO			
		CT - Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	6471 - Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	RAI - Sarana Pengembangan Kawasan		006 - Fasilitas Umum yang dibangun di Kawasan Transmigrasi			
		Catatan dan Tanggapan							
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas			



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		<p>Disnakertrans PBD</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kawasan Transmigrasi Klamono Segun sesuai SK Kemendes PDPT No 106/2018</li><li>- Tersedia RKT, RRSKP, RTSPE, dan DED.</li></ul>	<p>Kementerian Desa</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Usulan ini saat di rakortek belum terbahas.</li><li>- Terkait jalan belum ada usulan yang masuk.</li><li>- Tanggal 5-7 mei ada rakornas transmigrasi bisa dibahas dalam forum tersebut.</li><li>- Alternatif lain untuk jalan transmigrasi ini dimasukkan dalam DAK.</li></ul> <p>Dit PPKT Trans</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada saat pembahasan rakor akan kami bahas kembali untuk kesiapannya.</li><li>- Di PPKT Trans belum ada alokasi pagu indikatif, sehingga belum bisa menyampaikan apakah diterima atau ditolak.</li><li>- Hal tersebut bisa dilaksanakan jika alokasi anggarannya bisa memungkinkan.</li></ul>	<p>Dit Regional II</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Di PBD ada kawasan transmigrasi klamono segun, menjadi salah satu transmigrasi prioritas antara bappenas dan kemendes namun masih dalam proses kesepakatan penulisan di RPJMN.</li><li>- Posisinya dekat dengan DPP Raja Ampat, untuk detailnya perlu ada penajaman lagi.</li><li>- Usulan 21 dan 22 ini di lokasi yang sama. Usulannya 21 sudah sangat spesifik sementara di tolak dahulu. Untuk usulan 22 ini mungkin bisa diterima pada saat rakor transmigrasi.</li></ul>			
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
23		200	200	Orang	Kota Sorong	026 - KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN	DIAKOMODIR dengan



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

	Pelatihan Peningkatan Produktivitas	Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional		menyesuaikan ketersediaan anggaran dan instruktur sudah harus tersedia.		
		02 - Transformasi Ekonomi		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		04 - Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi				
		Program	Kegiatan	KRO		RO				
		DL - Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	4057 - Peningkatan Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan Binalavotas	SCO - Pelatihan Vokasi		038 - PBK Provinsi Papua Barat				
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>								
		Pemerintah Daerah		Kementerian Lembaga		Direktorat Sektor Bappenas				
Disnakertrans PBD - Pelatihan tersebut bisa kami akomodir dalam BPVP Kemenaker di Kota Sorong - Pelatihan terkait listrik. - BPVP Sempat melakukan pelatihan untuk instruktur namun keterbatasan anggaran sehingga tidak dilanjutkan.		Kementerian Ketenagakerjaan - Usulan apakah pelatihan produktivitas atau pelatihan PBK. - PBK nantinya di direktorat vokasi, sedangkan produktivitas di direktorat produktivitas. - Untuk pelatihan produktivitas membutuhkan instruktur khusus, apakah di PBD sudah ada instruktur. - Pengajuannya melalui Direktorat Bina Peningkatan Produktivitas, - Volume akan menyesuaikan		-						
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan			
		Usulan	Kesepakatan							



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

### PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

#### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

24	Pengembangan Rumah Sakit di Provinsi Papua Barat Daya	4	4	Unit	Kab. Sorong, Kab. Sorong Selatan, Kab. Maybrat, Kota Sorong	024 - KEMENTERIAN KESEHATAN	<b>DIAKOMODIR dengan menyiapkan ASPAK, RS Online di update dahulu data-datanya, dan RC nya.</b>		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		01 - Transformasi Sosial		04 - Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan		01 - Kesehatan untuk Semua			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		DG - Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	2051 - Pembinaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RAB - Sarana Bidang Kesehatan		009 - Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11)			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>				<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>	
		Bapperinda - Sesuai dengan arahan Gubernur, yang diusulkan di RS Selebesolo, RS JP Wanane, dan RS di Schoole Keyen  Direktur RS JP Wanane: - RS umum kab sorong kebetulan saat ini diseluruh PBD untuk tenaga spesialis kita yang terlengkap. RS ini dijadikan rujukan untuk PBD. Sehingga pasien yang dilayani		Kementerian Kesehatan Ditkes Yankes - Sarana bisa diusulkan melalui DAK, tetapi KJSU untuk alkes di SIHREN - Harus mengupdate Aspak, SIM RS Online terkait ketersediaan SDM Jantung - Kami harapkan ada 4 spesialis dasar dan 7 spesialis - RS Jantung ini dipetakan RS Madya, dari RC nya dijelaskan				-	



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		<p>bukan Cuma di kab sorong, melainkan dari Maybrat, raja ampat. Dari tempat yang jauh, mereka tidurnya di rumah sakit, ini menjadi persoalan rumah sakit dan tidur di ruang rawat inap.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sehingga, kami mengusulkan rumah singgah untuk keluarga pasien, sehingga keluarga yang mengantar bisa tinggal disana.</li><li>- Kami punya 13 Ha, sudah ada MP untuk rumah singgahnya.</li><li>- Rumah singgahnya kedepan tidak akan dikasih dengan gratis yaitu dengan sewa murah untuk maintance dari rumah singgah.</li><li>- Transformasi dr depart kesehatan menyangkut 5 masalah kesehatan, jantung, stroke dan kesehatan ibu anak. RS Kab Sorong saat ini masuk RS utama, kita udah siap menjadi RS Rujukan jantung.</li><li>- Menyangkut SDM sudah siap, dokter spesial jantung ada 2 dan perawat jantung ada 12 orang. Fasilitas Cath Lab sudah siap.</li><li>- RS Jantung Harapan kita ditargetkan pada bulan agustus bisa melakukan operasi jantung.</li><li>- Menggunakan anggaran BLUD membantu</li></ul>	<p>Ketika menjadi RS Madya mampu melaksanakan apa saja, SDMnya seperti apa dan Sarana Prasarannya.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kami akan petakan lokus-lokusnya. Dalam Strata KJSU.</li><li>- Usulan poli ini diusulkan saja</li><li>- DAK hanya bisa untuk ruang pelayanan, jika tidak terkait pelayanan tidak diakomodir.</li></ul>		
--	--	---	---	--	--



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cath Lab tahun lalu sudah disiapkan, untuk ruangan lain ICU, Kamar operasi jantung sebanyak 2 sesuai dengan aturan harus dekat dengan ICU, kami perlu ruangan jantung berdekatan dengan ICU.</li> <li>- Ruang gizi sudah siap, Gedung farmasi, dan Gedung IGD.</li> <li>- Tahun 2025 ruang laundry diganti dengan poli jantung</li> <li>- Ada beberapa alat kesehatan yang tidak masuk dalam DAK.</li> </ul> <p>Direktur RS Selebesolo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait kesiapan sarana baru 67 persen, SDM dokter sudah ada, namun identifikasi peralatan belum mencukupi.</li> </ul>					
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga	Hasil Kesepakatan
		Usulan	Kesepakatan				
25	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat	50	50	unit	Kab Maybrat	033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	DIAKOMODIR dengan kelengkapan RC.
		Agenda Pembangunan		Sasaran Visi		Arah Pembangunan Nasional	
		01 - Transformasi Sosial		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		03 - Perlindungan Sosial yang Adaptif	



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

### PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		Program	Kegiatan	KRO	RO	
		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penyediaan Akses Rumah Layak Huni	RBB - Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman	002 - Penyediaan Rumah Khusus Reguler	
<b>Catatan dan Tanggapan</b>						
		Pemerintah Daerah	Kementerian Lembaga	Direktorat Sektor Bappenas		
		<p>Bapperida:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Di maybrat dahulu ada kerusuhan (daerah konflik) dan rumah masyarakat hancur, saat ini mereka mengungsi dan tersebar di kabupaten.</li> <li>- Kami Sudah mengusulkan dalam musrenbangnas 2023 dari kementerian PUPR karena tidak ada pembangunan baru untuk rumah, lebih fokus pada bedah rumah.</li> </ul> <p>Dinas PUPR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kami membantu merehab rumah 100 unit, kami meminta 50 unit baru, kalau bisa masyarakat kembali ke daerah nya sendiri.</li> </ul>	<p>Ditjen Perumahan KemenPUPR</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rumah khusus harus dibangun di lahan yang bersangkutan</li> <li>- Untuk mengajukan usulan melalui aplikasi SIBARU (dengan kelengkapan dokumen)</li> <li>- Untuk PBD belum memiliki ID baru di SIBARU, sehingga perlu koordinasi dengan Balai Perumahan dahulu.</li> </ul>	<p>Dit Perkim :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kami melihat usulan ini, pada prinsipnya kami mengakomodir usulan ini karena sejalan dengan prioritas.</li> <li>- Namun catatan, rumah khusus ini tantangannya di Lahan, lahan harus clean and clear. Kelengkapan RC serta infrastruktur dasar perumahan harus dipastikan.</li> </ul>		
No	Usulan	Volume		Satuan	Lokasi Kab/Kota	Kementerian/Lembaga



**BAPPENAS**  
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

## NOTULENSI

# PERSIDANGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (MUSRENBANGNAS) TAHUN 2024

## PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

		Usulan	Kesepakatan				Hasil Kesepakatan		
26	Pembangunan Fasilitas Pelabuhan Sausapor	1	1	Unit	Kab. Tambraw	022 - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	DIAKOMODIR dengan kelengkapan RC dalam 2 minggu lagi		
		<b>Agenda Pembangunan</b>		<b>Sasaran Visi</b>		<b>Arah Pembangunan Nasional</b>			
		02 - Transformasi Ekonomi		02 - Kemiskinan Menuju Nol Persen dan Menurunnya Ketimpangan		07 - Integrasi Ekonomi Domestik dan Global			
		<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>KRO</b>		<b>RO</b>			
		GA - Program Infrastruktur Konektivitas	4637 - Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	RBP - Prasarana Bidang Konektivitas Darat		022 - Pelabuhan Penyeberangan (Prioritas Nasional)			
		<b>Catatan dan Tanggapan</b>							
		<b>Pemerintah Daerah</b>		<b>Kementerian Lembaga</b>		<b>Direktorat Sektor Bappenas</b>			
Bapperinda: - Secara eksisting sudah ada, namun kami ingin mengembangkan karena Tambraw menjadi marine superhub, disana menjadi perikanan terintegrasi. Dlaam musim tertentu, dapat angin dari utara yang dapat merusak konstruksi. Sehingga perlu dibuat yang lebih baik.		Kementerian Perhubungan - Masih menunggu kepastian dokumen lingkungan/izin lingkungan, melampirkan surat penghapusan asset.		Dit Transport - Untuk Pelabuhan ini kewenangannya di Pusat, kelengkapan teknis terkait RC dan lainnya perlu dilengkapi - Dokumen lingkungan belum sepenuhnya selesai. Jika lahan sudah siap, kami akan bisa membawa ke TM (2 minggu lagi).					

**3. REKAPITULASI**

<b>HASIL KESEPAKATAN</b>	<b>TOTAL USULAN BERDASARKAN HASIL KESEPAKATAN</b>
Diakomodir	<b>10</b>
Ditolak	<b>16</b>
Tidak Terbahas	-